



KERUSAKAN SARPRAS DI MALIOBORO

Perlu Monitoring dan Penambahan SDM

YOGYA (KR) - Rusaknya beberapa sarana dan prasarana (sarpras) yang ada di kawasan semi pedestrian Malioboro, menjadi pekerjaan rumah (PR) semua pihak. Diperlukan monitoring dan penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM), baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun komunitas serta masyarakat di kawasan Malioboro.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro Sujarwo Putro menuturkan, kerusakan sarpras dan kurang terjaganya kebersihan di kawasan itu dikarenakan kurangnya monitoring dan SDM. Misalnya, persoalan kebersihan di kawasan Malioboro yang dinilai masih minim petugas karena hanya ada lima orang dalam sehari.

"Belum lagi tempat sampah yang ada sudah banyak yang rusak, tutupnya hilang dan lain-lain. Hal itu saya kira karena kurangnya monitoring dan terbatasnya SDM atau petugas kebersihan yang mengcover kawasan yang cukup luas," kata Sujarwo kepada KR di Grand Inna Malioboro, Kamis (5/9).

Melihat kondisi demikian, menurut Sujarwo perlu dilibatkan komunitas yang ada di kawasan Malioboro, setidaknya untuk menjaga kebersihan kawasan. Yang tak kalah penting adalah ditingkatkannya monitoring dan penambahan petugas kebersihan agar persoalan yang muncul segera bisa diatasi mengingat kawasan Malioboro adalah destinasi wisata utama di Yogyakarta.

Sedangkan untuk keamanan nonorganik di kawasan Malioboro, Jogoboro yang jumlahnya sekitar 80 orang juga perlu ditambah dan diperjelas tugasnya. Termasuk memperbanyak petugas kebersihan dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) apabila ada sarpras yang rusak bisa dicek sehingga segera diganti atau diperbaiki.

Hal senada diungkapkan Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas (TP5) DIY Rani Sjamsinarsi. Menurut Rani, meski sarpras di kawasan semi pedestrian Malioboro dibangun untuk kepentingan publik. Tapi bukan berarti masyarakat bisa melakukan hal-hal yang di luar seharusnya, sehingga fasilitas jadi cepat rusak. Konsekuensi dari itu, publik bersama pemerintah harus proaktif menjaga agar fasilitas publik yang disediakan bisa tetap terjaga dengan baik.

"Memang, pemerintah ada alokasi dana untuk pemeliharaan, tapi bukan berarti masyarakat bersikap cuek dan pasif dalam menjaga fasilitas publik. Tentunya, pemeliharaan itu harus dilakukan secara rutin. Jangan sampai rusak parah baru diperbaiki, karena biayanya jadi lebih mahal," terang Rani.

Keberadaan fasilitas publik yang ada di kawasan semi pedestrian Malioboro, tambah Rani harus dijaga bersama. Karena fasilitas tersebut dibangun dengan uang rakyat, jadi pemeliharaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia berharap agar masyarakat bisa merasa memiliki dan mau menjaga fasilitas yang ada di kawasan semi pedestrian Malioboro.

"Jangan sampai karena masyarakat bersikap masa bodoh, kerusakannya jadi parah, sehingga alokasi dana pemerintah tidak mencukupi. Salah satu caranya, penggunaan fasilitas tersebut sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak cepat rusak," ungkapnya. (Ira/Ria)-d

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

1.

2.

3.

4.

5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005